



Judul Artikel : Perumusan Rencana Strategis Pengembangan Pariwisata  
Provinsi Jawa Barat: Suatu Kerangka Pemikiran

Penulis Utama : Ivantia S. Mokoginta  
Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan  
Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan  
Jl. Ciumbuleuit 94 – Bandung 40141

Penulis Kedua : E. Maryani  
Jurusan Geografi, Universitas Pendidikan Indonesia  
Jl. Dr. Setiabudhi - Bandung

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Katolik Parahyangan

Bandung, 27 Juli 2001  
Penulis Utama,

Elsje Kosasih, Dra. Ak., MSc.

Ivantia S. Mokoginta



*Mengetahui*  
*Koncil*  
ELSJE KOSASIH, DRA. AK., MSc.  
(DEKAN FE UMPAR)

# PERUMUSAN RENCANA STRATEGIS PENGEMBANGAN PARIWISATA PROVINSI JAWA BARAT: SUATU KERANGKA PEMIKIRAN

Ivantia S. Mokoginta  
e-mail: [ivantia@home.unpar.ac.id](mailto:ivantia@home.unpar.ac.id)

E. Maryani  
e-mail: [emaryani@yahoo.com](mailto:emaryani@yahoo.com)

## **Abstract**

*Tourism should be understood as a multidimensional phenomenon that encompasses physical, social, cultural, human as well as economic dimensions. Accordingly, those dimensions should have been used as a basic framework in formulating strategic planning for tourism. This paper explains how physical, social, cultural, human, and economic dimensions are merged in order to integrate a sustainable development concept in formulating a tourism strategic planning. In the last part of this paper, the authors also propose a revision for existing tourism development planning of West Java Province for the period of 2001-2010.*

Krisis moneter yang terjadi pada pertengahan tahun 1997, telah menyadarkan kita untuk menggali sektor-sektor yang dapat mendongkrak perolehan devisa. Salah satu sektor yang mampu untuk mendongkrak perolehan devisa tersebut adalah pariwisata. Sebagai gambaran, perkembangan pariwisata yang dilihat dari perkembangan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada akhir tahun anggaran 1993/94 baru mencapai 3.400.804 kunjungan. Pada tahun 1998/99, jumlah kunjungan wisman meningkat menjadi 4.263.332 kunjungan atau telah meningkat sebesar 25 persen. Selanjutnya, penerimaan devisa juga meningkat dari US\$ 3.984,7 juta pada tahun 1993/94 menjadi US\$ 4.162,3 juta pada tahun 1998/99 atau meningkat sebesar 4,5 persen. Sejak tahun anggaran 1993/94 - 1998/99 penerimaan devisa pariwisata tersebut telah menjadikan pos transaksi bersih perjalanan luar negeri menjadi satu-satunya yang positif dengan jumlah yang terus meningkat dibanding transaksi jasa-jasa lainnya dalam neraca pembayaran Indonesia (Pokok-pokok Reformasi Pariwisata: [www.bappenas.go.id/bap\\_ind.html](http://www.bappenas.go.id/bap_ind.html) dalam Pembangunan Prasarana).

Kesadaran akan pentingnya sektor pariwisata, tertuang dalam GBHN 1998 di mana pengembangan pariwisata dijadikan sektor andalan dan unggulan dalam menghasilkan devisa, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan

daerah, memberdayakan perekonomian masyarakat, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha. Selain itu, BAPPENAS juga telah menyusun visi pengembangan pariwisata nasional yang tertuang dalam dokumen "Pokok-pokok Reformasi Pariwisata." Visi tersebut menyatakan, bahwa:

1. Pariwisata menjadi andalan pembangunan nasional dalam bidang ekonomi dan bidang-bidang lainnya demi kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia.
2. Indonesia menjadi kawasan pariwisata dunia yang mengutamakan pengembangan pariwisata nusantara dan sekaligus sebagai tujuan wisatawan mancanegara.

Dalam dokumen itu diuraikan pula berbagai program yang dapat dilakukan untuk mencapai visi tersebut. Sayangnya, visi dalam dokumen BAPPENAS itu, kurang menggema dan tidak diberi makna secara proporsional dalam kerangka acuan pengembangan pariwisata daerah Jawa Barat. Hal ini tercermin dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah Jawa Barat 2001-2010 dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Provinsi Jawa Barat 2001-2002, khususnya tentang sektor pariwisata yang telah disampaikan oleh Bapak Gubernur Jawa Barat dan dimuat dalam Harian Pikiran Rakyat beberapa waktu yang lalu.

Tulisan ini mencoba untuk memberikan masukan bagi proses pengembangan pariwisata di Jawa Barat dan Daerah secara lebih menyeluruh. Manfaat dari adanya proses pengembangan yang menyeluruh dan tersistematis ini antara lain adalah:

1. Memudahkan instansi terkait bidang kepariwisataan dalam menyusun program kerjanya secara lebih terarah dan tersistematis.
2. Memudahkan pengembangan kepariwisataan dalam mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat dan para pelaku usaha pariwisata.
3. Memudahkan lembaga-lembaga pendidikan bidang kepariwisataan dalam merumuskan kurikulum yang dibutuhkan untuk pengembangan sumberdaya manusia, khususnya di bidang perencanaan pariwisata.

Isi tulisan ini secara khusus akan membahas tentang:

1. Proses perumusan rencana strategis pengembangan pariwisata yang akan dibagi dalam tiga tahap.
2. Penjelasan tentang pokok-pokok materi yang ada dalam masing-masing tahap pengembangan pariwisata.
3. Usulan revisi butir-butir pengembangan pariwisata dalam Pola Dasar dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.

## **I. Tahapan Dalam Proses Perumusan Rencana Strategis Pengembangan Pariwisata**

Secara umum, penulis membagi proses perumusan rencana strategis pengembangan kawasan pariwisata ke dalam tiga tahap. Tahap-tahap tersebut adalah tahap praperencanaan, tahap definisional, dan tahap perumusan strategi. Tahap praperencanaan pada dasarnya merupakan tahap *assessment* untuk berbagai komponen dasar seperti faktor fisik kawasan, faktor sosial-budaya, dan faktor sumberdaya manusia<sup>\*)</sup>. Tujuan dari tahap praperencanaan ini adalah untuk memahami berbagai kelebihan dan kekurangan yang dimiliki daerah yang akan dikembangkan.

Selanjutnya, tahap definisional merupakan tahap di mana *values* atau nilai-nilai yang akan dikembangkan dalam kegiatan pariwisata dirumuskan. Perumusan ini harus sejalan dengan hasil *assessment* yang diperoleh pada tahap praperencanaan. Hasil akhir dari tahap ini adalah dirumuskannya visi dan misi pengembangan serta sasaran dan tujuan yang akan dicapai beserta indikator-indikatornya. Indikator-indikator ini berhubungan dengan daya dukung fisik, daya dukung sosial budaya, dan tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk setempat.

Tahap strategi merupakan tahap di mana berbagai strategi pengembangan dirumuskan. Dalam tahap ini, penulis akan membagi strategi pengembangan dalam empat kelompok, yaitu strategi yang berhubungan dengan pengembangan fisik, perumusan program kegiatan, pembentukan sistem kelembagaan, dan mekanisme

---

<sup>\*)</sup> Prinsip ini sesuai dengan isi dari *the Hague Declaration on Tourism* (WTO, 1989) yang menyatakan, bahwa: *An unspoilt natural, cultural, and human environment is a fundamental condition for the development of tourism...[therefore]...rational management of tourism may contribute significantly to the protection and development of the physical environment and the cultural heritage, as well as to improving the quality of life.*

pendanaan. Penjelasan tentang komponen masing-masing tahap pengembangan akan dijelaskan secara lebih rinci dalam subbab berikut ini.

## **II. Komponen-komponen dalam Proses Perumusan Rencana Strategis Pengembangan Kepariwisata**

Dalam rencana pengembangan jangka panjang (Pola Dasar Pembangunan Daerah Jawa Barat 2001-2010) tentang pariwisata, tampaknya pengembangan bisnis pariwisata menjadi titik tolak pengembangan pariwisata di daerah. Selanjutnya, **Pengembangan Bisnis Pariwisata** ini akan dijalankan melalui dua program; yaitu **Program Pengembangan Pariwisata** dan **Program Kegiatan Penunjang**. Penyusunan semacam itu dikhawatirkan akan muncul masalah-masalah di masa mendatang. Masalah ini timbul terutama akibat adanya penekanan pembangunan pariwisata yang lebih menitikberatkan pada aspek ekonomi, yaitu bisnis pariwisata (baca: hotel) seperti yang terlihat selama ini. Dalam jangka panjang, pembangunan pariwisata yang cenderung menitikberatkan pada aspek ekonomi akan memberikan dampak negatif seperti:

1. Sulitnya menciptakan *civil society* seperti yang dituangkan dalam butir-butir visi pembangunan Jawa Barat. Telah dipahami, bahwa pariwisata pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang sangat bersifat *intrusive*. Pengaruh positif maupun negatif dari kegiatan para wisatawan yang berkunjung ke destinasi akan sangat mempengaruhi kehidupan dan nilai-nilai sosial budaya penduduk setempat. Pembangunan pariwisata yang cenderung berpihak pada pengembangan bisnis pariwisata dapat berakibat pada pencegahan dampak negatif kegiatan pariwisata bagi kehidupan sosial budaya penduduk setempat menjadi sekunder.
2. Sulit untuk mendorong peran serta aktif yang positif dari penduduk setempat dalam kegiatan pariwisata di daerah. Pada saat kegiatan pariwisata yang tumbuh di suatu kawasan berbenturan dengan nilai-nilai sosial budaya yang dianut oleh penduduk setempat, maka tindak kekerasan massa yang terjadi di beberapa daerah di Jawa Barat akan terus berlangsung. Kondisi ini akan

menyulitkan kita semua untuk menjadikan Jawa Barat sebagai kawasan yang menarik untuk para penanam modal.

3. Sulit untuk mencapai kondisi berkelanjutan (*sustainability*) sebagaimana tertuang dalam butir-butir visi pembangunan Jawa Barat. Pembangunan pariwisata yang lebih menitikberatkan pada aspek ekonomi akan mendorong adanya kecenderungan *over exploitation* kawasan, khususnya sumberdaya alam. Hal ini akan menyebabkan penurunan kualitas objek dan daya tarik wisata yang bercorak alami.
4. Sulit untuk menciptakan kegiatan ekonomi masyarakat. Hal ini disebabkan, karena pada dasarnya tingkat keahlian dan keterampilan masyarakat cenderung kurang memadai, sehingga dalam pengembangannya seringkali aspek keuntungan ekonomis harus dikorbankan terlebih dahulu.

### **II.1. Tahap Praperencanaan**

Banyaknya aspek yang harus diperhatikan dalam pengembangan kepariwisataan menyebabkan pemahaman tentang kepariwisataan harus diperluas. Selain aspek ekonomi, pemahaman ini harus memasukkan pula aspek sosial budaya dan lingkungan, sehingga ketiga unsur ini akan menjadi tiang utama dalam pembangunan pariwisata di daerah Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan prinsip ini, maka pengembangan pariwisata pada dasarnya adalah pengembangan potensi dari ketiga faktor tersebut di atas. Karena potensi setiap kawasan berbeda, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah analisis situasional yang pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk menggali berbagai potensi wisata yang ada di suatu kawasan. Analisis situasional ini menyangkut tiga hal utama, yaitu:

1. *Physical Assessment*. Termasuk dalam kategori ini adalah upaya untuk mencari informasi tentang kondisi morfologi tanah, iklim, kualitas air, temperatur, flora dan fauna. Tujuan dari analisis ini adalah mencari berbagai potensi alam dan hayati yang dapat dikembangkan menjadi objek dan daya tarik wisata andalan suatu kawasan.
2. *Social-cultural Assessment*. Termasuk di dalamnya adalah nilai-nilai sosial budaya yang dianut penduduk, sumber mata pencaharian utama penduduk,

berbagai jenis kesenian tradisional yang ada, situs-situs yang bernilai sejarah, *event* budaya yang digelar berkenaan dengan peristiwa tertentu, pakaian khas, arsitektur rumah adat dan adat istiadat lainnya. Tujuan dari penilaian ini adalah salah satu sumber informasi tentang objek dan daya tarik wisata budaya andalan dan jenis kegiatan pariwisata yang dapat dikembangkan, tanpa merusak nilai-nilai sosial budaya yang berlaku.

3. *Human Resources Assessment*. Penilaian ini terutama bertujuan untuk mencari informasi tentang kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia yang ada di wilayah pengembangan. Informasi yang diperoleh dari *assessment* ini dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengembangan berbagai program pendidikan dan pelatihan bidang pariwisata yang dibutuhkan. Adanya program ini akan membantu penduduk untuk dapat memanfaatkan berbagai peluang kerja dan berusaha di sektor pariwisata, sehingga dalam jangka panjang tingkat kesejahteraan penduduk dapat lebih baik.

Hasil akhir dari analisis ini adalah diperolehnya informasi tentang berbagai potensi dan kekurangan di daerah yang akan dikembangkan menjadi kawasan pariwisata.

## II.2. Tahap Difinisional

Dalam tahap ini, visi dan misi pengembangan kepariwisataan dirumuskan. Perumusan ini harus disesuaikan dengan visi dan misi pembangunan di daerah. Dalam Pola Dasar Pengembangan Provinsi Jawa Barat, tampaknya *civil society*, *sustainability*, dan *community-based economy* akan menjadi nilai-nilai dasar pengembangan secara umum dan kepariwisataan secara khusus. Berdasarkan nilai-nilai inilah, maka sasaran dan tujuan pengembangan akan dapat dirumuskan. Dalam perumusan sasaran dan tujuan pengembangan, maka beberapa indikator yang sesuai dengan nilai-nilai di atas akan digunakan sebagai dasar untuk mengukur keberhasilan pengembangan kepariwisataan dapat dirumuskan. Indikator-indikator tersebut antara lain adalah:

1. *Physical carrying capacity*. Indikator ini mengukur daya dukung fisik kawasan untuk dikembangkan menjadi kawasan pariwisata. Termasuk dalam

pengukuran ini adalah penentuan penurunan kualitas fisik kawasan yang masih dapat ditoleransi.

2. *Social carrying capacity*. Indikator ini terutama dibutuhkan untuk menentukan berbagai corak kegiatan kepariwisataan yang dapat dikembangkan tanpa harus mengorbankan berbagai nilai-nilai sosial budaya dari penduduk setempat.
3. *Economic welfare indicators*. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk setempat sebagai akibat adanya pengembangan kepariwisataan di daerah. Dengan adanya indikator ini, maka dampak ekonomi kegiatan pariwisata pada tingkat kesejahteraan penduduk dapat diketahui.

Indikator-indikator di atas berfungsi sebagai pemberi arah pengembangan kepariwisataan, sehingga visi dan misi yang telah dirumuskan dapat dicapai. Setelah indikator-indikator ini dirumuskan, maka langkah selanjutnya adalah menentukan strategi pengembangan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

### II.3 Tahap Strategikal

Pemahaman pariwisata secara lebih luas sebagaimana dijelaskan di atas, akan memaksa kita untuk menempatkan objek dan daya tarik wisata -- yang merupakan unsur-unsur *what to see* dan *what to do* bagi wisatawan -- sebagai titik sentral dalam pembangunan pariwisata di suatu kawasan. Dengan demikian, penginventarisasian, pengembangan, dan pelestarian berbagai potensi objek dan daya tarik wisata seharusnya menjadi titik awal pembangunan pariwisata. Adapun alasan mengapa hal tersebut menjadi penting adalah, karena unsur-unsur ini akan menjadi alasan utama bagi para wisatawan untuk mengunjungi suatu kawasan pariwisata. Untuk itu, perlu dicari dan dirumuskan tema sentral dari kegiatan pariwisata Jawa Barat atau Daerah berdasarkan berbagai potensi yang ada. Tema sentral ini akan menjadi suatu nilai jual yang unik bagi kegiatan pariwisata di Jawa Barat dan Daerah. Selanjutnya, unsur *what to buy* yang merupakan pengembangan aspek ekonomi dalam pembangunan pariwisata disesuaikan dengan tema sentral yang telah dirumuskan. Dengan demikian, seluruh kegiatan pariwisata di kawasan yang berhubungan dengan *what to see*, *what to*

*do*, dan *what to buy* akan memberikan *sense of place* tertentu bagi wisatawan yang berkunjung ke suatu kawasan. Atmosfer alam, sosial dan budaya yang khas dan unik ini akan menjadi daya tarik utama kawasan pariwisata yang dikembangkan.

Langkah selanjutnya setelah tema sentral ini dirumuskan, adalah merumuskan rencana pengembangan fisik kawasan, rencana pengembangan program, pengembangan sistem kelembagaan pariwisata, dan sistem pendanaan pelaksanaan program. Keseluruhan kegiatan di atas pada dasarnya bertumpu pada tema sentral objek dan daya tarik wisata yang akan dikembangkan. Rencana pengembangan fisik antara lain berhubungan dengan (Gunn, 1979):

1. Zonifikasi objek dan daya tarik wisata. Penentuan zona ini disesuaikan dengan penyebaran objek dan daya tarik wisata yang ada di lokasi.
2. Zonifikasi pembangunan fasilitas pelayanan pariwisata seperti sarana akomodasi, restoran, sarana informasi dan berbagai sarana penunjang pariwisata lainnya.
3. Rencana pengembangan jalur transportasi sebagai aksesibilitas antar objek wisata, antara objek dengan fasilitas pelayanan pariwisata, antar kawasan wisata, dan antara daerah asal dengan daerah tujuan wisata.

Selanjutnya, rencana pengembangan program, yang antara lain, berhubungan dengan:

1. Program pengembangan rencana strategis pemasaran kawasan pariwisata. Pencarian karakteristik sasaran pasar yang jelas dan terarah akan memudahkan para pembuat keputusan untuk merumuskan strategi pemasaran yang akan dijalankan. Dengan demikian, suatu kawasan pariwisata yang telah dikembangkan akan mampu menarik wisatawan dalam jumlah yang signifikan.
2. Program pengembangan sumberdaya manusia untuk memenuhi kebutuhan kegiatan pariwisata di daerah. Program ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan penduduk setempat sehingga mampu memanfaatkan berbagai peluang kerja dan usaha yang akan muncul sebagai akibat adanya kegiatan pariwisata di daerah, sehingga tingkat kesejahteraan penduduk dapat ditingkatkan.

pimpinan badan ini harus memberikan pertanggungjawaban operasional dan keuangan baik kepada pemerintah maupun kepada para anggotanya. Dengan demikian, mekanisme kontrol dilakukan baik dari sisi internal (anggota), maupun eksternal (pemerintah).

Secara keseluruhan, sistematika perumusan rencana strategis pengembangan pariwisata untuk Provinsi Jawa Barat dapat dirangkum dalam Diagram 1 di bawah ini:

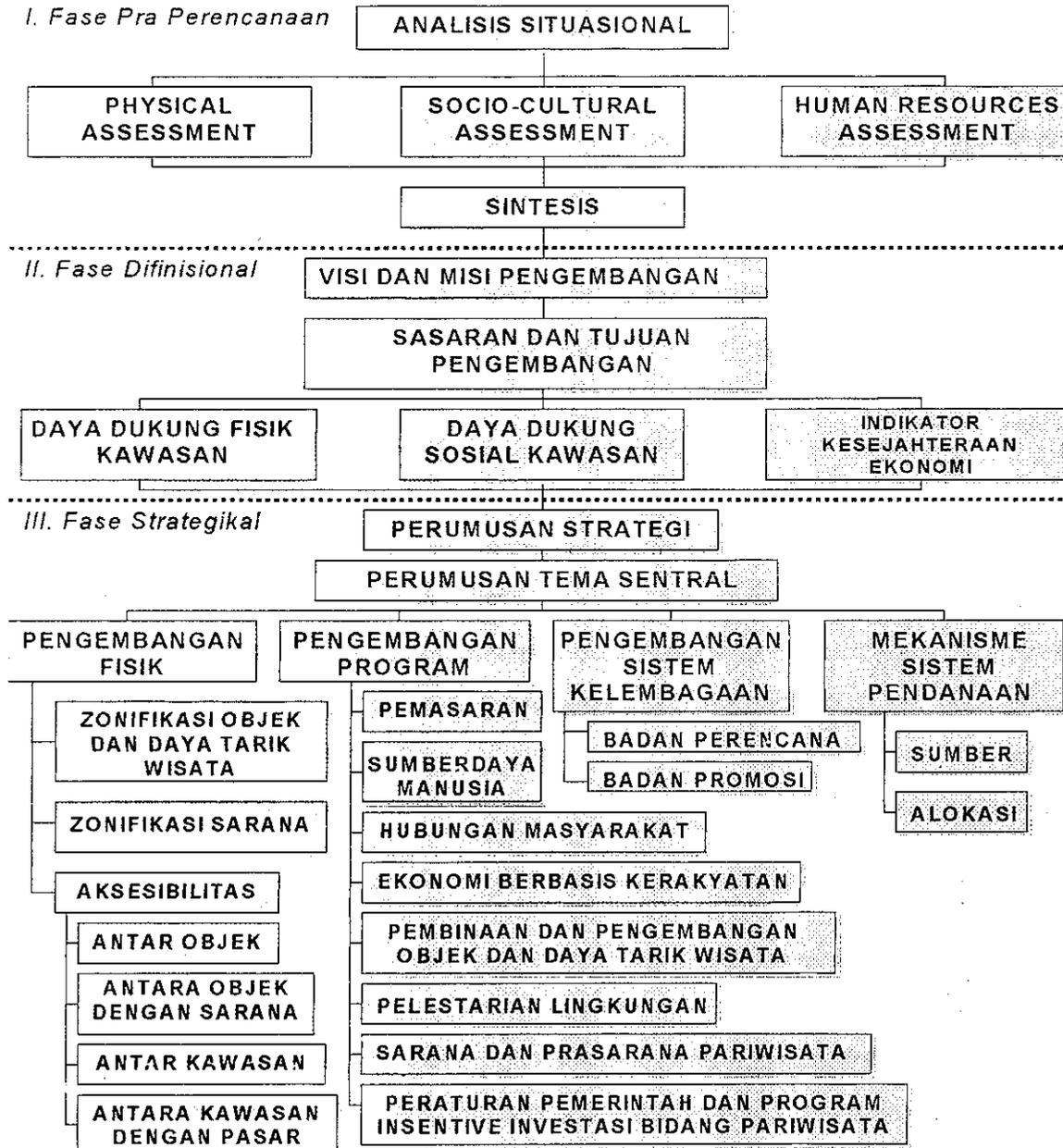


DIAGRAM 1. PROSES PERUMUSAN RENCANA STRATEGIS PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN PROVINSI JAWA BARAT

Berdasarkan kerangka acuan tersebut, maka rencana strategis pengembangan pariwisata yang merupakan tanggung jawab badan perencana dapat segera dirumuskan. Selanjutnya rencana strategis pengembangan ini akan berfungsi sebagai *blue print* dari pengembangan dan kegiatan kepariwisataan di daerah. Dalam pelaksanaannya, peran swasta, masyarakat, perguruan tinggi, dan organisasi-organisasi lainnya dalam kepariwisataan harus selalu mengacu pada *blue print* ini. Dengan demikian berbagai kegiatan kepariwisataan yang dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat akan dapat terkoordinasi dengan baik.

### **III. Usulan Tentang Rencana Strategis Pengembangan Kepariwisata Provinsi Jawa Barat**

Akhirnya, berdasarkan seluruh penjelasan di atas, maka usulan tentang butir-butir pengembangan pariwisata dalam Pola Dasar dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Provinsi Jawa Barat yang mencakup empat butir utama adalah sebagai berikut:

- I. Perencanaan fisik yang berhubungan dengan pemanfaatan tata ruang
  1. Zonifikasi objek dan daya tarik wisata berdasarkan penyebarannya
  2. Zonifikasi sarana pariwisata beserta sarana penunjangnya
  3. Pengembangan jaringan transportasi dan aksesibilitas:
    - i. Antar objek dan daya tarik wisata di suatu kawasan
    - ii. Antara objek dengan sarana pariwisata di suatu kawasan
    - iii. Antar kawasan pariwisata
    - iv. Antara daerah asal wisatawan (*generating area*) dengan daerah tujuan wisata (*destination area*).
- II. Pengembangan program pembangunan kepariwisataan
  1. Program pengembangan rencana strategis pemasaran kawasan pariwisata.
  2. Program pengembangan sumberdaya manusia
  3. Program kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan hubungan masyarakat.
  4. Program pengembangan ekonomi berbasis kerakyatan
  5. Program pembinaan dan pengembangan objek dan daya tarik wisata.
  6. Program perencanaan pelestarian lingkungan

7. Program pengembangan sarana dan prasarana pariwisata
8. Perumusan berbagai peraturan daerah dan insentif investasi sektor pariwisata.

### III. Pembentukan sistem kelembagaan pariwisata di daerah

1. Pembentukan badan perencanaan pariwisata
2. Pembentukan badan promosi pariwisata

### IV. Pendanaan kegiatan kelembagaan dan program kepariwisataan

1. Pengidentifikasian sumber-sumber PAD sektor pariwisata
2. Mekanisme pengalokasian dana untuk membiayai program kepariwisataan

Usulan program pengembangan kepariwisataan di Jawa Barat sebagai mana dijelaskan di atas akan dapat digunakan untuk merumuskan program kerja dari instansi terkait di daerah.

### Penutup

Pelaksanaan kegiatan pengembangan kepariwisataan sebagaimana dirumuskan di atas membutuhkan perubahan perilaku dan sikap mental dari seluruh *stakeholders* yang terlibat. Adanya kesiapan pemerintah di daerah, di satu sisi, untuk lebih transparan dan mau 'mengendurkan' kendali yang selama ini dipegang dan, di sisi lain, kesiapan masyarakat dan para pelaku usaha untuk terlibat secara langsung dalam proses perumusan dan pelaksanaan strategi pengembangan pariwisata secara lebih bertanggung jawab, merupakan prasyarat mutlak bagi keberhasilan pengembangan pariwisata sebagaimana dicita-citakan bersama.

---

### DAFTAR KEPUSTAKAAN

*Global Code of Ethics for Tourism* (1997). Madrid: World Tourism Organization.

Gunn, Clare. "Land Assessment for Tourism Development." Makalah dalam *Seminar Tourism Strategies: Their Development and Implementation*. Banff, Alberta, 28-30 Oktober 1979.

Mathieson, Alister dan Geoffrey Wall (1986). *Tourism: Economic, Physical, and Social Impacts*. London: Longman Group Limited.

Mokoginta, Ivantia. "Perumusan Nilai Tambah Suatu Kawasan Pariwisata: Suatu Kerangka Pemikiran dari Pendekatan Pemasaran." Makalah disampaikan dalam *Seminar Nasional Prospek Pengembangan Terpadu Kawasan Wisata Bahari Koridor Jakarta – Banten – Lampung dan Kawasan Lain*. Jakarta, 18 - 19 Oktober 2000.

-----, "Perubahan Nilai-nilai dalam Pengembangan Kawasan Pariwisata Nasional dan Dampaknya." *Belum Diterbitkan*.

Pokok-pokok Reformasi Pariwisata (2000). [www.bappenas.go.id/bap\\_ind.html](http://www.bappenas.go.id/bap_ind.html) dalam Pembangunan Prasarana.

Inskeep, Edward (1991). *Tourism Planning: An integrated and Sustainable Development Approach*. New York: Van Nostrand Reinhold.

Pearce, Douglas (1992). *Tourist Organizations*. Hongkong: Longman Group UK. Ltd.

Pola Dasar Pembangunan Daerah Jawa Barat 2001-2010. *Harian Pikiran Rakyat – Bandung*.

Ritchie, Brent. "Tourism Policy and Strategy – Structure and Process." Makalah dalam *Seminar Tourism Strategies: Their Development and Implementation*. Banff, Alberta, 28 - 30 Oktober 1979.

---